

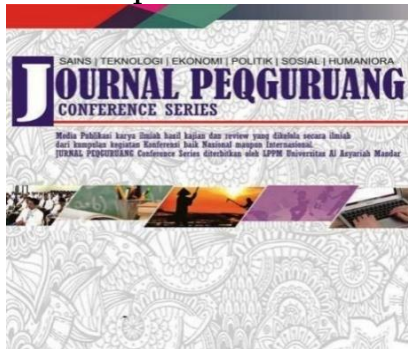
Journal Pegguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCS

Vol. 8 No. 1 MEI 2026

Graphical abstract



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KECAMATAN WONOMULYO

¹Ananda Putri Khumaerah, ²Muhammad massyat,
³Ahmad Saleh
^{1,2,3}Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

anandaputrikhumaerah21@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the local government policy of Polewali Mandar Regency regarding the management of organic waste. The type of research used is qualitative descriptive research. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documentation. This study aims to examine the implementation of local government policies regarding organic waste management in Polewali Mandar Regency. Using a qualitative descriptive method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included the head of the environmental agency, the leader of the Matappa community, and local residents. The results show that while the policy has been moderately effective, challenges persist, such as limited resources, low public participation, and insufficient regulatory support. Nonetheless, there is growing awareness and commitment from both the implementers and the community. Overall, the policy has been reasonably effective, although improvements and strengthening are still needed in several aspects.

Keywords: *policy implementation, local government, organic waste*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah organik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pengelolaan sampah organik. Informan pada penelitian ini terdiri dari kepala dinas, ketua komunitas Matappa, serta masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan pengelolaan limbah organik di Polewali Mandar sudah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Meski begitu, ada kesadaran dan komitmen yang positif dari pelaksana dan masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah berjalan dengan cukup efektif, meskipun masih perlu perbaikan dan penguatan di beberapa aspek.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Sampah Organik*

Article history

DOI: 10.35329/jp.v8i1.6783

Received : 04-05-2026 / Received in revised form : 10-05-2026 / Accepted : 16-05-2026

1. PENDAHULUAN

Sampah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia dan di banyak negara lain. Pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi yang pesat, dan Perubahan gaya hidup masyarakat berkontribusi terhadap lonjakan jumlah sampah yang cukup besar. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Kehutanan, n.d.) menunjukkan bahwa Indonesia memproduksi lebih dari 60 juta ton sampah per tahun, dengan dominasi kontribusi dari daerah perkotaan.

Timbulan sampah tak terrelakkan dan perlu penanganan yang tepat, karena pengelolaan yang tidak layak dapat menimbulkan polusi lingkungan. Situasi tersebut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Pengelolaan limbah Berdasarkan kategori yaitu limbah organik, anorganik, dan limbah yang mengandung bahan berbahaya serta beracun (B3) (Sucipto, 2012). Salah satu dampak buruk terhadap lingkungan berasal dari kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam sampah. Hingga kini, permasalahan sampah di Indonesia masih berlanjut karena layanan pengelolaan yang tersedia masih tergolong terbatas. (Sumantri, 2015)

Guna mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah (UUD RI, 2008). Regulasi ini mengharuskan setiap warga untuk mengurangi serta mengelola sampah rumah tangga dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Lebih lanjut, pemerintah daerah diberdayakan untuk berperan secara signifikan dalam rangkaian kegiatan pengurangan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Sebagaimana diselaraskan dengan kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang dijadikan fondasi hukum bagi penanganan sampah di tingkat local. (PERDA Polewali, 2018)

Pengelolaan sampah saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, berfokus pada dua aspek utama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Langkah-langkah pengurangan dilakukan mulai dari titik awal timbulnya sampah hingga proses pengelolaan akhirnya. Dalam praktiknya, pengurangan sampah diwujudkan melalui peran serta aktif masyarakat serta dukungan dari pihak pengelola sampah. (Zulkifli, IR, & Saleh, 2024)

Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat merusak estetika lingkungan, menimbulkan bau yang menyengat, serta menjadi pemicu timbulnya berbagai jenis penyakit. Masalah ini sering kali berasal dari sumber sampah itu sendiri, yakni ketika para penghasil sampah gagal melakukan penanganan yang tepat. Sebagai ilustrasi, sebagian masyarakat cenderung enggan menyediakan wadah sampah di rumah dan lebih memilih membuang limbah secara sembarangan ke saluran air atau membakarnya, yang pada ujungnya

menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar. Praktik membakar sampah bahkan telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian besar orang menyadari dampak negatif dari pembakaran sampah, praktik ini tetap dilakukan dan dianggap sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. (Setiawan dkk, 2014)

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar masih menghadapi berbagai kendala. Ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Amola Kecamatan Binuang menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik, seperti pasar, pinggir jalan, dan kawasan permukiman. Permasalahan diperparah oleh keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya fasilitas pembuangan, serta rendahnya Tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam memilah sampah organik dan anorganik..

Khususnya di Kecamatan Wonomulyo, permasalahan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Masyarakat masih terbiasa membuang sampah secara sembarangan, sementara pengetahuan tentang pemilahan dan pemanfaatan limbah organik masih minim. Padahal, limbah organik dapat diolah menjadi produk bermanfaat melalui komposting atau biokonversi, yang selain mengurangi volume sampah juga memberikan nilai tambah ekonomi.

Upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah seringkali terhambat oleh keterbatasan fasilitas, anggaran, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai sejauh mana implementasi kebijakan pemisahan dan pengelolaan limbah organik telah dijalankan di Kecamatan Wonomulyo, apa saja hambatan yang dihadapi, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Diperlukan peningkatan disiplin kerja karena hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pencapaian kinerja aparatur agar lebih optimal. Selain itu, setiap lembaga atau organisasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi sebagai pendorong utama dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban. Upaya tersebut dapat terealisasi melalui pengawasan yang tegas untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku, sekaligus membangun rasa tanggung jawab yang kuat dalam menjalankan tugas guna mencapai tujuan organisasi. (Nursam, Massyat, & Saharuddin, 2024).

Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo Sesuai dengan pendapat Sugiyono (Sugiyono, 2019), penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi untuk menangkap fenomena secara alami. Penelitian ini dilakukan dua bulan, di wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Waktu penelitian yang dibutuhkan pada bulan Februari sampai Maret 2025

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang, termasuk Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ketua Matappa, Dan berbagai masyarakat.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, alat tulis, dan perangkat perekam. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap praktik pengelolaan sampah organik, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta pengumpulan dokumentasi berupa dokumen resmi, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data merupakan suatu susunan prosedur yang harus dilaksanakan secara berurutan untuk memudahkan peneliti dalam proses memudahkan peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dijelaskan oleh Sugiyono (2014) memiliki tiga langkah reduksi data untuk menyortir informasi penting, analisis data dalam format sistematis, dan kesimpulan atau verifikasi untuk menilai validitas dan keterkaitan data dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo masih menemui sejumlah kendala, baik dari aspek keterbatasan sumber daya, komunikasi antar lembaga, maupun komitmen para pelaksana dalam merealisasikan kebijakan. Salah satu temuan penting adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep serta mekanisme pengelolaan sampah organik. Banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip dasar pengelolaan sampah organik, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan hasil olahan seperti kompos. Bahkan, masih ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan beban TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah organik guna menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja pemerintah kecamatan maupun Kelurahan di wilayah Wonomulyo. Minimnya pemahaman ini menandakan belum optimalnya proses sosialisasi dan edukasi mengenai

kebijakan tersebut. Akibatnya, implementasi kebijakan cenderung bersifat formalitas administratif, tanpa diiringi oleh perubahan perilaku dan komitmen nyata dari para pelaksana kebijakan.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan ini juga dihambat oleh kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan dalam hal pengolahan sampah organik, seperti pelatihan pembuatan kompo atau pemanfaatan limbah organik untuk pertanian. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan ini berdampak pada rendahnya efektivitas program, serta berpotensi memperbesar resistensi terhadap perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, pembahasan ini akan diarahkan untuk menganalisis implementasi pengelolaan sampah berdasarkan indikator-indikator kunci yang disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan publik, agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan secara nyata di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat apa saja yang dilakukan Pemerintah dalam pengimplementasian *pengelolaan sampah*, maka penulis menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yang mencakup :

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator krusial bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik terletak pada standar dan sasaran kebijakan. Standar kebijakan tersebut perlu dirumuskan dengan jelas serta dapat diukur secara tepat, sedangkan sasaran kebijakan harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial-budaya di lapangan. Ketidajelasan standar dan sasaran dapat menghambat proses implementasi dan menyebabkan kegagalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Bahtiar, S.STP., MM, serta Ketua Lembaga Matappa Kecamatan Wonomulyo, Bapak ABD. Basid, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah organik telah dijalankan sebagai upaya mengurangi timbulan sampah, khususnya dari pasar dan rumah tangga. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi volume pembuangan sampah sembarangan dan mencegah munculnya bau yang mengganggu, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat.

Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lembaga pengelolaan sampah di Kecamatan Wonomulyo, seperti Lembaga Matappa. Kolaborasi ini menunjukkan adanya komitmen antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan tujuannya telah dirumuskan dengan jelas, masih terdapat tantangan dalam hal optimalisasi pelaksanaan di lapangan. Beberapa aspek teknis seperti pemilahan sampah, kesadaran masyarakat dalam mendukung program, serta kesinambungan

program pengolahan menjadi pupuk kompos, masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa, walaupun standar dan tujuan kebijakan telah diformulasikan secara jelas, pelaksanaannya masih belum mencapai tingkat optimal akibat keterbatasan dalam pemilahan sampah serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, serta lemahnya keberlanjutan program. Padahal, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), standar yang jelas dan tujuan yang realistis merupakan indikator penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, jika dihubungkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo dapat dikatakan telah memenuhi aspek kejelasan standar dan tujuan, namun belum sepenuhnya efektif dalam pencapaiannya. Hal ini menegaskan pentingnya strategi penguatan kapasitas masyarakat, kolaborasi kelembagaan, serta edukasi berkelanjutan agar standar dan sasaran yang telah ditetapkan benar-benar terwujud dalam praktik.

3.2 Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan adalah penilaian sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan standar dan sasaran yang sudah ditetapkan sejak awal. Dalam perspektif ini, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut dapat diwujudkan secara nyata dan memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan tujuan semula.

Hasil wawancara dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ketua Lembaga Matappa Wonomulyo, implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik telah memiliki dukungan sumber daya manusia, keuangan, serta teknologi, namun masih menghadapi beberapa keterbatasan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan.

Dinas Lingkungan Hidup telah menugaskan petugas kebersihan dan pendamping lapangan untuk mendukung proses pengangkutan dan pengelolaan sampah organik. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan lembaga pengelolaan sampah seperti Matappa dalam pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Di sisi lain, Lembaga Matappa juga membentuk tim khusus yang menangani pengangkutan dan pengolahan sampah secara rutin, menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam penguatan SDM.

Dari sisi pembiayaan, pengelolaan sampah organik didukung oleh anggaran dari APBD, namun anggaran tersebut masih tergolong terbatas karena tergabung dengan alokasi untuk pengelolaan seluruh jenis sampah. Keterbatasan dana ini berdampak pada terbatasnya fasilitas dan jangkauan program, seperti penyediaan alat kompos, armada pengangkut, dan pembangunan tempat pengolahan. Matappa sendiri turut menanggung biaya operasional melalui dana internal lembaga, meskipun mereka juga menerima bantuan berupa alat dan kendaraan dari pihak Dinas maupun Bank Sulselbar.

Penggunaan teknologi juga mulai diterapkan, seperti mesin pencacah untuk mempercepat proses

penghancuran sampah organik. Namun, pemanfaatan teknologi ini masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan skala besar dalam pengolahan sampah di wilayah tersebut.

Dari sisi teknologi, pemanfaatan mesin pencacah sudah mulai diterapkan, tetapi masih terbatas dan belum mampu menjawab kebutuhan skala besar. Kondisi ini menguatkan bahwa meskipun kebijakan telah didukung dengan instrumen dasar, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Di samping itu, upaya sosialisasi kepada masyarakat belum merata, partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah organik masih rendah. Padahal van meter van horn, komunikasi efektif antara pelaksana dan antara pemerintah dengan masyarakat sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo sudah memenuhi sebagian indikator kinerja, terutama dari segi adanya dukungan SDM dan kelembagaan. Namun, hambatan pada aspek keuangan, fasilitas pendukung, keterbatasan teknologi, serta komunikasi dengan masyarakat menjadi faktor penghambat yang menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi melalui peningkatan alokasi anggaran, pemanfaatan teknologi yang lebih luas, penguatan kerjasama antar sektor dan peningkatan sosialisasi untuk mencapai standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

3.3 Sumberdaya

Dalam konteks ini, sumber daya meliputi dua aspek penting yaitu keuangan dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia mencakup kualitas, kemampuan, dan jumlah staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program. Sementara itu, sumber daya finansial mencakup ketersediaan anggaran serta efisiensi dalam penggunaan dana untuk mendukung keberlangsungan program secara optimal.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik, komunikasi antar organisasi serta pelaksanaan kegiatan di lapangan merupakan aspek krusial yang menentukan efektivitas program secara keseluruhan. Tidak hanya diperlukan kebijakan yang jelas, namun juga dibutuhkan alur komunikasi yang aktif dan menyeluruh antara pemerintah daerah, lembaga pelaksana, serta masyarakat sebagai target utama dari kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa dinas secara rutin melakukan koordinasi dengan lembaga pengelolaan sampah melalui berbagai media komunikasi seperti sosialisasi langsung dan surat edaran. Selain itu, upaya edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah juga mulai dilakukan, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat yang cenderung membuang atau membakar sampah organik secara sembarangan karena dianggap lebih praktis.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Matappa mengindikasikan bahwa komunikasi antara dinas dan lembaga telah terjalin, namun belum optimal. Penyampaian informasi mengenai pengelolaan sampah organik kepada masyarakat belum merata, sehingga masih banyak warga yang belum mengerti cara yang tepat atau manfaatnya. Kunjungan dan interaksi dari dinas memang sering dilakukan, namun penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi kebijakan. Informasi dari pembuat kebijakan belum tersampaikan secara efektif dan inklusif kepada masyarakat, sehingga partisipasi masih rendah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa komunikasi yang tidak merata dan tidak sistematis akan menghambat efektivitas implementasi.

Dengan demikian, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih terstruktur dan partisipatif, seperti penyuluhan berbasis komunitas, kampanye lingkungan melalui media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi. Selain itu, sistem umpan balik dari masyarakat perlu dibangun agar komunikasi tidak hanya satu arah. Dengan penguatan komunikasi dan distribusi informasi yang lebih luas, kebijakan pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo berpotensi berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada pola hidup serta kualitas lingkungan masyarakat.

3.4 Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi di antara lembaga-lembaga pelaksana mengacu pada mekanisme atau prosedur yang telah disusun secara matang untuk mendiskusikan program-program yang sedang berjalan atau akan diimplementasikan. Komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan sangat penting agar setiap pihak memahami tujuan, standar, serta aktivitas operasional yang menjadi tanggung jawab mereka. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka koordinasi dan sinkronisasi antarunit dapat tercapai, sehingga implementasi kebijakan atau program dapat dilakukan secara lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Lembaga Matappa Kecamatan Wonomulyo, diketahui bahwa struktur dan karakteristik badan pelaksana dalam pengelolaan sampah organik telah terbentuk secara fungsional, Masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperjelas, khususnya mengenai fungsi spesifik dalam pengelolaan sampah organik.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan bidang khusus yang menangani urusan persampahan, lengkap dengan unit pelaksana teknis (UPT) Kebersihan yang bertugas langsung di lapangan. Penugasan pelaksana dilakukan berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka terhadap pengelolaan sampah, termasuk dalam hal pengolahan sampah organik. Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Dinas, untuk pengelolaan sampah organik secara spesifik, peran dan struktur yang menangani belum sepenuhnya terdefinisi

secara formal dalam dokumen organisasi, meskipun pelaksanaan teknis di lapangan tetap dijalankan oleh petugas yang memahami proses tersebut.

Dari sisi lembaga pelaksana di masyarakat, Ketua Lembaga Matappa menjelaskan bahwa meskipun latar belakang pendidikan anggota berbeda-beda, namun seluruh petugas telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan sampah organik, mulai dari tahap pemilahan hingga proses pembuatan kompos. Petugas di lapangan juga menjalankan tugasnya secara profesional, di mana setiap hari mereka melaporkan data pengumpulan dan produksi kompos secara rutin. Monitoring harian dilakukan oleh pengurus lembaga untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kerja dari petugas lapangan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi fungsional antara pemerintah daerah dan lembaga masyarakat, meskipun secara administratif struktur kelembagaan khusus sampah organik belum sepenuhnya diperjelas. Hal ini sekaligus mengonfirmasi teori Van Meter dan Van Horn bahwa ketika struktur pelaksana belum sepenuhnya jelas, implementasi kebijakan masih bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh komitmen, kapasitas SDM, serta mekanisme monitoring yang disiplin.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas jangka panjang, penguatan struktur formal dan pembinaan teknis yang berkelanjutan diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat bekerja secara lebih optimal, transparan, dan responsif terhadap dinamika di masyarakat.

3.5 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana kebijakan merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, karakteristik tersebut mengacu pada berbagai aspek internal yang melekat pada organisasi pelaksana kebijakan, mulai dari struktur organisasi, sumber daya, hingga budaya kerja yang berkembang. Menurut Van Meter dan Van Horn, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana karakteristik badan pelaksana mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ketua Lembaga Matappa Kecamatan Wonomulyo, diketahui bahwa kondisi sosial masyarakat serta komitmen politik dari pimpinan daerah menjadi faktor kunci yang menentukan kesuksesan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah organik.

Dari segi sosial, hambatan terbesar muncul akibat tingkat kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat yang masih rendah terhadap pengelolaan sampah, khususnya dalam proses pemisahan sampah organik dan non-organik. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, perilaku membuang dan membakar sampah masih menjadi kebiasaan masyarakat. Informasi dan edukasi yang diberikan belum sepenuhnya mampu mengubah pola pikir dan kebiasaan warga. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Matappa yang menegaskan bahwa meskipun warga hadir dalam kegiatan sosialisasi, praktik

di lapangan masih menunjukkan kecenderungan perilaku lama yang sulit diubah.

Selain aspek sosial, kondisi politik juga memainkan peran yang sangat signifikan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menekankan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah. Jika kepala daerah memiliki visi lingkungan yang kuat dan menjadikan pengelolaan sampah organik sebagai prioritas, maka dukungan terhadap program akan hadir baik dalam bentuk regulasi, pendanaan, maupun dorongan kebijakan lintas sektor. Sebaliknya, apabila pimpinan tidak menunjukkan keseriusan, maka jalannya program akan terhambat, terutama dalam pengalokasian anggaran dan penguatan kelembagaan.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya soal “ada tidaknya” struktur organisasi dan sumber daya, tetapi juga soal bagaimana karakteristik pelaksana berinteraksi dengan kondisi sosial serta dukungan politik di sekitarnya.

Oleh karena itu, strategi implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik harus diarahkan pada Penguatan kesiapan sosial masyarakat melalui edukasi publik, kampanye partisipatif, dan pembiasaan perilaku ramah lingkungan. Penguatan dukungan politik dengan menjadikan isu sampah organik sebagai agenda prioritas pembangunan daerah.

Kombinasi keduanya akan memperkuat karakteristik badan pelaksana sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3.6 Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik

Keberhasilan Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam model implementasi kebijakan mereka, van meter van horn menyebutkan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi kondisi eksternal dimana kebijakan tersebut di implementasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ketua Lembaga Matappa Wonomulyo, kecenderungan pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik menunjukkan adanya komitmen yang positif, baik dari lembaga pemerintah maupun masyarakat pelaksana di tingkat lapangan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih dihadapkan pada keterbatasan dalam aspek regulasi dan cakupan pemahaman yang belum merata.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan sampah secara umum, namun hingga saat ini belum tersedia regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan sampah organik secara terpisah. Meskipun demikian, DLHK tetap melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk di Kecamatan Wonomulyo. Sosialisasi ini sebagian besar masih bersifat umum, mencakup pemilahan sampah secara keseluruhan, bukan khusus pada aspek organik. Namun kegiatan monitoring

terhadap lembaga pengelola sampah tetap dilakukan secara rutin sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program.

Dari sisi pelaksana di lapangan, Lembaga Matappa menunjukkan kecenderungan yang sangat positif. Petugas-petugas pengelola sampah organik menjalankan tugas mereka dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh, mereka memahami betapa pentingnya peran mereka dalam menjaga dan melindungi. Ketua Matappa menegaskan bahwa motivasi kerja para petugas bukan sekadar menjalankan kewajiban, tetapi dilandasi oleh kesadaran dan niat Guna berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi yang bermanfaat dan pelestarian lingkungan. Selain menjalankan tugas teknis, mereka juga aktif berdiskusi untuk meningkatkan pemahaman serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah organik.

Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat dan ketiadaan regulasi khusus masih menjadi faktor penghambat. Dalam kerangka teori Van Meter dan Van Horn, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan pada dimensi lingkungan politik (regulasi) dan lingkungan sosial (kesadaran masyarakat). Meskipun kecenderungan pelaksana sudah positif, keberhasilan implementasi tetap memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif serta strategi komunikasi yang lebih terarah untuk menjangkau masyarakat secara luas.

Dengan demikian, untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan regulasi khusus, pengembangan materi sosialisasi yang lebih fokus pada sampah organik, serta pelatihan lanjutan bagi petugas agar dapat berperan sebagai edukator masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai apabila faktor eksternal—baik regulasi maupun kondisi sosial—dapat mendukung secara optimal komitmen para pelaksana di lapangan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini mengacu teori Van meter van Horn (Hamdi, 2015) pada tujuh indikator implementasi kebijakan, yaitu: standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, serta kecenderungan pelaksana. Dari ketujuh indikator tersebut, ditemukan bahwa faktor komunikasi menjadi hambatan utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah organik di Kecamatan Wonomulyo telah dilaksanakan secara formal, namun masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama terletak pada komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sosialisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah organik.

Program yang ada, termasuk dukungan lembaga pelaksana seperti Matappa, belum berjalan merata karena kurangnya penguatan kapasitas pelaksana dan

minimnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta komitmen politik yang konsisten agar kebijakan pengelolaan sampah organik dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Hamdi, M. (2015). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (n.d.). *Data dan informasi pengelolaan sampah nasional*. [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia](#)

Nursam, M. R., Massyat, M., & Saharuddin, A. (2024). Upaya peningkatan disiplin kerja bidang kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Pegguruang*, xx(x), 151–161.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah*. [JDIIH Polewali Mandar](#)

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008.

Setiawan, D., Syahputra, A., & Iqbal, M. (2014). Rancang bangun alat pembuka dan penutup tong sampah otomatis berbasis mikrokontroler. *JURTEKSI Royal*, xx(x), 1–7.

Sucipto. (2012). *Teknologi pengolahan daur ulang sampah*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumantri. (2015). *Metode penelitian kesehatan*. Prenada Media.

Zulkifli, I. R., R., & Saleh, A. (2024). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Darma Kecamatan Polewali. *Journal Pegguruang*, xx(x), 689–693.